

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang tergolong cukup besar, sehingga pemerintah Indonesia memprioritaskan perkembangan ekonomi dan sosial. Pemerintah melaksanakan pembangunan di masa yang akan datang. Pemerintah membuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik dilaksanakan langsung oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pemenuhan program kerja dilakukan dengan membuat anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dan anggaran pendapatan daerah (APBD). Anggaran pendapatan pemerintah negara yang cukup besar mengharuskan pemerintah daerah bertanggung jawab sendiri untuk mengatur dan mengelola keuangan daerahnya.

Dalam setiap perekonomian, pemerintah mengeluarkan dana untuk keperluan pembangunan dan memperbaiki fasilitas daerahnya agar tercapai kesejahteraan masyarakat. Demi mewujudkan keinginan tersebut pemerintah harus memikirkan rencana ekonomi kedepannya. Perlu adanya laporan keuangan yang mencatat sumber pendapatan pemerintah daerah tiap tahunnya. Pemerintah dapat menyusun anggaran pendapatannya dalam bentuk anggaran pendapatan belanja daerah (APBD).

Permendagri No.13 Tahun 2006 menyatakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan daerah yang

dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan Daerah.

APBD merupakan alat/wadah untuk menampung berbagai kepentingan publik yang diwujudkan melalui berbagai kegiatan dan program dimana pada saat tertentu manfaatnya benar-benar akan dirasakan oleh masyarakat. APBD adalah salah satu aspek penting dari pemerintah daerah untuk mengatur dan mengelola masalah keuangan dan anggaran suatu daerah. Anggaran pendapatan belanja daerah atau APBD yang merupakan kebijakan utama pemerintah daerah untuk menentukan besarnya pendapatan dan belanja suatu daerah, dan sebagai alat bantu pengambilan keputusan dan rencana pembangunan kedepannya. APBD juga sebagai alat untuk mengetahui pengeluaran pemerintah daerah dimasa yang akan datang, serta mengevaluasi penepatan belanja pada tahun-tahun yang akan datang.

Pemerintah harus terus melakukan improvisasi dalam pengelolaan kinerja keuangan dengan mengeluarkan berbagai kebijakan yang didasari tujuan untuk memaksimalkan kinerja keuangan secara kreatif dan inovatif serta meminimalisir pemanfaatan bantuan dan subsidi dari pemerintah pusat dengan berbagai cara salah satunya yakni memaksimalkan sumber pendapatan asli daerahnya. Abdul Halim, (2011) menjelaskan bahwa ciri utama suatu daerah, dengan arti harus memiliki kewenangan untuk dapat menggali sumber keuangan yang ada di daerah. Mengelola dan menggunakan keuangan sendiri untuk membiayai kegiatan pemerintahan, dan ketergantungan terhadap dana dari pemerintah pusat harus seminimal mungkin

agar pendapatan asli daerah menjadi sumber keuangan, yang menjadi faktor penghambat keberhasilan pemerintah daerah dalam menjalankan otonomi daerah adalah: transfer dari pemerintah pusat yang dominan, karena pemerintah daerah kurang memaksimalkan perusahaan daerah sebagai sumber PAD, tingginya derajat sentralisasi pada sektor perpajakan, rendahnya penerimaan pajak dan lamanya dalam pemberian subsidi dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.

Kinerja keuangan merupakan pencapaian atas tingkat hasil kerja pada bidang keuangan pemerintah daerah yang meliputi penerimaan dan belanja daerah dengan menggunakan berbagai indikator keuangan yang telah ditetapkan melalui suatu kebijakan atau ketentuan perundang-undangan selama satu periode anggaran, analisis kinerja keuangan pada dasarnya dilakukan untuk menilai kinerja periode yang sudah berlalu dengan melakukan berbagai analisis sehingga memperoleh posisi keuangan yang memiliki kegunaan untuk memberi informasi tentang kondisi keuangan secara nyata serta untuk mengukur dan memprediksi potensi-potensi kinerja keuangan pada masa yang akan datang melakukan pengukuran kinerja.

Pengukuran kinerja untuk kepentingan publik dapat dijadikan evaluasi dan memulikan kinerja sebagai pembandingan skema pelaksanaan kerja serta peningkatan dan pengembangan kinerja pemerintah daerah, pengukuran kinerja keuangan dapat menggunakan analisis rasio keuangan daerah terhadap perhitungan anggaran pendapatan serta belanja daerah yang terdiri dari rasio kemandirian, rasio efektivitas, dan rasio efisiensi pendapatan

asli daerah. Mahmudi, (2006) kinerja keuangan dapat digunakan sebagai ukuran keberhasilan daerah otonomi dalam menyelenggarakan otonomi daerah dengan melihat kinerja keuangan dan akuntabilitas dari para pemangku kuasa dapat dilihat, setiap rupiah uang rakyat harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat yang telah memberikan uang untuk membiayai pembangunan serta memberikan manfaat kepada masyarakat Kabupaten Kepulauan Tanimbar.

Kabupaten Kepulauan Tanimbar merupakan salah satu daerah otonomi yang berada di Indonesia, sehingga selama menjalankan otonomi daerah kota ini memiliki hak, wewenang serta kewajiban dalam mengurus dan mengatur daerah sendiri termasuk pengelolaan keuangannya. Bagi pemerintah daerah dengan adanya otonomi daerah dapat memberikan kontribusi pemerintah untuk menyediakan sarana sebagai penunjang pelaksanaan pembangunan ekonomi daerah terkait akses faktor-faktor produksi dan modal. Bentuk dari pertanggungjawaban dari pemerintah daerah dilihat dalam laporan keuangan pemerintah daerah dan laporan kinerja. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Laporan Keuangan Terdiri dari 7 Laporan Yakni Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, Serta Catatan atas Laporan Keuangan. Peran pemerintah daerah dalam pelaksanaan pembangunan harus terus ditingkatkan. Hal ini dimaksudkan untuk lebih mewujudkan otonomi daerah yang lebih nyata dan bertanggung jawab. Salah

satu cara untuk mencapai tujuan yang ada melalui pelaksanaan pendapatan Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) yang dikelola secara baik.

Penelitian ini didukung oleh Anim Rahamyati, (2016) yang menyatakan dalam hasil penelitiannya pada kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten sukoharjo masih belum optimal. Dalam pengelolaan pendapatan asli daerah sudah efektif dan efisien namun tingkat kemandirian daerah masih sangat rendah. Selain itu, dengan menggunakan rasio keserasian diketahui bahwa dalam menggunakan dana masih belum berimbang karena sebagian besar digunakan untuk belanja operasi dari pada digunakan untuk belanja modal. Hery Susanto (2019) Hasil analisis menunjukkan bahwa dari perhitungan rasio efektivitas dapat dikategorikan efektif, rasio efisiensi dikategorikan tidak efisien, rasio kemandirian keuangan daerah masih rendah, rasio aktivitas kurang baik.

Berdasarkan latar belakang dengan hasil penelitian terdahulu maka penulis tertarik untuk mengambil judul skripsi **“Analisis Anggaran Pendapatan Dan Belanja Untuk Menilai Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Maluku Periode 2020–2022”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Bagaimana menganalisis Anggaran Pendapatan Dan Belanja Untuk Menilai Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Untuk Periode 2020 – 2022.?

**C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis Anggaran Pendapatan Dan Belanja Untuk Menilai Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Untuk Periode 2020 – 2022.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini berguna bagi:

a. Peneliti

Penelitian ini memberi wawasan dan pemahaman peneliti dalam mengimplementasikan teori akuntansi sektor publik khususnya analisis anggaran Pendapatan Dan Belanja Untuk Menilai Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Untuk Periode 2020 – 2022.

b. Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar

Hasil penelitian ini berguna bagi Daerah Kepulauan Tanimbar dalam menyelenggarakan anggaran Pendapatan Dan Belanja Untuk Menilai Kinerja Keuangan Daerah.

c. Universitas

Hasil penelitian ini bermanfaat bagi para mahasiswa sebagai referensi untuk melakukan penelitian yang berkaitan dengan analisis anggaran Pendapatan Dan Belanja Untuk Menilai Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Untuk Periode 2020 – 2022.